

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJ - IP)

**SKPD BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah dewasa ini dihadapkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Good Governance), untuk itu di dalam pelaksanaannya sangat diharapkan pemerintahan yang Akuntabel, Kredibel dan Transparan.

Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan salah satu unit kerja perangkat daerah yang berada pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai tugas pokok menyusun perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan menyelenggarakan pembinaan, administrasi dan sumber daya dibidang Kebudayaan,Keaarsipan,Perpustakaan dan Kepora, Kesehatan,Pengendalian Penduduk & KB,Sosial dan Kependudukan & Capil, serta Pendidikan dan Keagamaan, yang didalam pelaksanaannya mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Arah kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam GBHPD, memberikan indikasi bahwa pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat dipadukan dengan pemerintah yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga masyarakat digerakkan berdasarkan realitas social yang dihadapi. Fungsi aparatur pemerintah daerah pada hakikatnya membina masyarakat lokal, sehingga pembangunan daerah identik dengan pengembangan masyarakat.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah memerlukan sebuah kebijakan sebagai petunjuk, penentu arah, sasaran dan tujuan, serta dengan cara bagaimana pemerintahan dan pembangunan akan dilaksanakan. Kebijakan itu diwujudkan dalam sebuah rencana strategis yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan dan pembinaan, walaupun belum seluruhnya dapat diwujudkan secara nyata dengan Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat tahun 2018, untuk jelasnya dapat dilihat pada pengukuran kinerja seperti terlampir.

Pangkajene Sidenreng, 22 Januari 2019.

KEPALA BAGIAN KESRA,

BACHTIAR, S.HI, M.SI

Pangkat : Pembina.

NIP. 19710122 199203 1003.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), maka Pemerintah Daerah dewasa ini dihadapkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Good Governance), untuk itu di dalam pelaksanaannya sangat diharapkan pemerintahan yang akuntabel, kredibel dan transparan.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj-IP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah..

Proses penyusunan LKj-IP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah LKj-IP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKJ-IP Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKJ-IP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKJ-IP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKJ-IP, selain itu juga menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKJ-IP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok menyusun perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan menyelenggarakan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk & KB, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama.

1). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

- 2). Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas diuraikan sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai denga bidangg tugasnya;
 - g. Menyusun rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, social, kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
 - h. Melaksanakan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, social, kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
 - i. Melaksanakan koordinasi pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, social, kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
 - j. Melaksanakan bantuan bidan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Social, kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
 - k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan sarana di bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, social, kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
 - l. Menyusun rumusan kebijakan di bidang keagamaan;
 - m. Melaksanakan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan sarana agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, pondok pesantren, kelembagaan agama dan pembinaan kehidupan beragama;
 - n. Melaksanakan koordinasi pembinaan sarana agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama, dan pembinaan kehidupan beragama
 - o. Melaksanakan bantuan sarana agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama, dan pembinaan kehidupan beragama;
 - p. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan sarana agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama, dan pembinaan kehidupan beragama;
 - q. Menyusun rencana dan melaksanakan pengelolaan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas di Lingkup Bagian kesejahteraan Rakyat;
 - r. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan barang di Lingkup Bagian Kesra
 - s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian (KABAG) yang menjalankan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

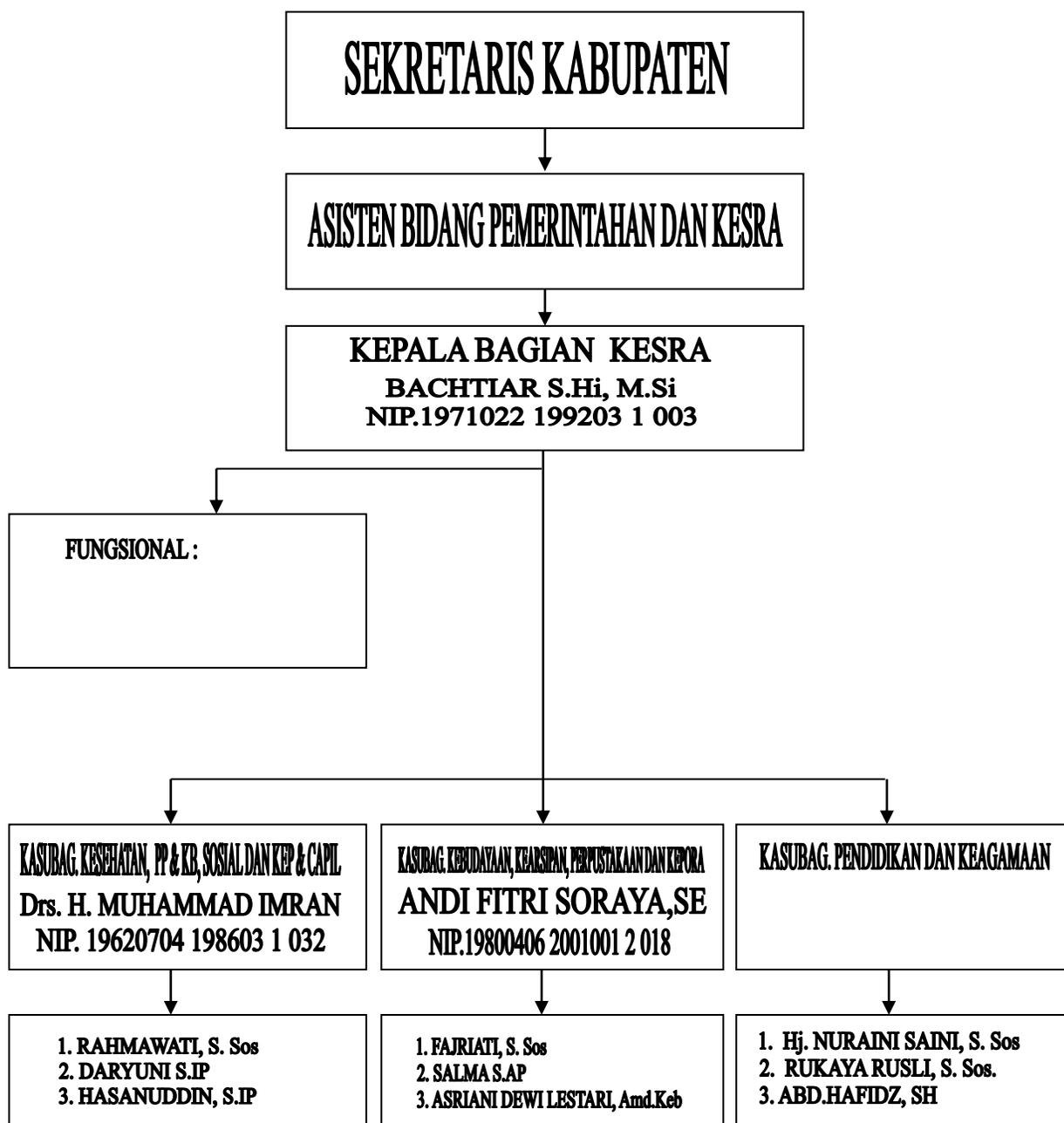
Untuk melaksanakan semua fungsinya, Bagian Kesejahteraan Rakyat dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Bagian yang juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati, maka Bagian Kesra telah mendapat sarana dan prasarana yang memadai, seperti sarana transportasi, dan sarana perkantoran.dll.

Sarana transportasi untuk memperlancar pelayanan, tugas koordinasi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya pada masing-masing unit kerja masih menghadapi permasalahan, maka dengan ini Bagian Kesra Setda Kab. Sidrap, sesuai dengan bidang dan tugasnya dapat memberikan pelayanan yang prima agar dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Good governance sesuai dengan visi dan misi Bupati yang terpilih, maka kendala dan hambatan yang dihadapi, sehingga ada beberapa target kegiatan yang belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan, karena disebabkan oleh antara lain :

- Terbatasnya kemampuan dana, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana.
- Terbatasnya kemampuan daerah segi financial dan personil yang profesional.
- Kebutuhan masyarakat setiap tahunnya semakin meningkat terutama yang terkait dengan kegiatan kesejahteraan masyarakat.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :



F. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Sumber daya manusia pada Bagian Kesra Tahun 2018 dapat dilihat dari keadaan pegawai sebagai berikut yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, golongan, kepangkatan serta tingkat pendidikan sbb:

Tabel. 1. 1. Berdasarkan Jenis Kelamin (Gender)

| No. | URAIAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|-----|---|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | Kepala Bagian | 1 Orang | - | 1 Orang |
| 2 | Kasubag Kesehatan, PP & KB, Sosial dan Kependudukan & Capil | 1 Orang | - | 1 Orang |
| 3 | Kasubag Kebudayaan, Kearsipan, Perpustakaan dan Kepora | - | 1 Orang | 1 Orang |
| 4 | Kasubag Pendidikan dan Keagamaan | 1 Orang | - | 1 Orang |
| 5 | Staf PNS | - | 5 Orang | 5 Orang |
| 6 | Tenaga Kontrak Kerja (Honorar) | 3 Orang | 2 Orang | 5 Orang |
| | JUMLAH | 6 Orang | 8 Orang | 14 Orang |

Tabel 1.2. Berdasarkan Golongan, Pangkat dan Strata Pendidikan

| NO. | ESALON | GOLONGAN | | | | | STRATA PENDIDIKAN | | | | |
|-----|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | IV | III | II | I | TOTAL | SLTP | SLTA | S-1 | S-2 | TOTAL |
| 1 | III | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | IV | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
| 3 | STAF | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 |
| 4 | HONORER | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| | JUMLAH | 1 | 8 | - | - | 9 | - | - | 13 | 1 | 14 |

G. INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Para Imam dan Petugas Syara.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK (RS)

Dalam perencanaan Strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi yang diemban kesemuanya itu diarahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai komponen utama dalam menggerakkan dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tergambar dalam tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat. Terkait dengan hal itu, maka berikut ini akan dikemukakan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 yang kaitannya dengan capaian Visi dan Misi Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1. VISI

Visi pada hakekatnya dimaknai sebagai wawasan tentang masa depan yang realistis, tidak mengada-ada, rasional, implementasi dan mampu memberikan motivasi yang memiliki nilai dan spirit budaya yang dapat mendorong semangat masyarakat Sidenreng Rappang. Oleh karena itu betapapun idealnya masa depan yang dicita-citakan, namun tetap melihat kondisi objektif yang ada di lapangan.

Berdasarkan kondisi riil tersebut kemudian ditransformasikan melalui ide-ide segar, inovasi logis dan realistis dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan target-target terukur. Dan dalam pencapaiannya tentu saja diperlakukan adanya dukungan 9eligi dan suasana etos kerja yang kondusif, sehingga implementasi visi tersebut selalu segar dan tidak ketinggalan zaman artinya ada ruang untuk selalu melakukan perbaikan karena memang sifatnya yang tidak kaku, melainkan 9eligio untuk selalu diperbaharui sesuai tantangan, dinamika, kebutuhan dan ukuran baru.

Dalam merumuskan dan menetapkan Visi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari *Visi* Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yakni :

“ Terwujudnya Sidenreng Rappang yang maju dan terkemuka bersama masyarakat Religius dengan pendapatan meningkat dua kali lipat, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai *Visi* sebagai berikut :

“ Terwujudnya Masyarakat Sidenreng Rappang yang Beriman, Bertaqwa, Terampil, Sehat, Sejahtera, Berbudaya dan Mandiri “. Yang merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu yang disesuaikan wujud dan makna Visi Kabupaten Sidenreng Rappang yang implementasinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, sehingga Misi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tindakan atau kemauan yang kuat dengan memperhatikan kewenangan dan tanggungjawab atas kepentingan social.

Misi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- *Optimalisasi Pembinaan Kehidupan Beragama yang merupakan nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai pedoman dan sumber-sumber kearifan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ;*
- *Optimalisasi Pembinaan Sosial Kemasyarakatan secara terpadu melalui pendekatan kelembagaan sosial.*
- *Melaksanakan Pembinaan Sekolah Sehat melalui pengembangan Usaha Kesehatan Lingkungan Sekolah;*
- *Melaksanakan Pembinaan Pendidikan dan Mental Spritual yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi ;*
- *Melaksanakan Pembinaan Kepemudaan dan Kebudayaan melalui Sosialisasi dan penyuluhan dalam penguatan kelembagaan sosial,*
- *Melaksanakan Pembinaan Pengendalian Penduduk & KB, serta kependudukan dan capil melalui penguatan organisasi dan kelembagaan sosial;*
- *Membangun Staf yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan fungsi pelayanan dan pengelolaan administrasi yang baik dan bersih.*
- *Meningkatkan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait.*

3. TUJUAN

Merespon dengan melalui misi tersebut diatas ditetapkan strategis dengan meningkatkan peran serta masyarakat dengan pemerintah dalam membangun dan pengembangan kelembagaan. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan akan bertumpu pada potensi dan kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi. Kesemuanya ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Misi 1 : Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Penegakan Supermasi Hukum dan Pengembangan Kebijakan Yasng Pro Poor, Pro Job dan Pro Environment

Tujuan 1. : Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran.

Tujuan 2. : Meningkatkan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Misi 2 : Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Sumber daya Manusia yang Berdaya Saing Tinggi Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan.

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pendalaman agama dan mensprit

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas Kesehatan Lingkungan Sekolah, Guru dan Anak didik.

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Bagian Kesra

| TUJUAN | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET AKHIR RENSTRA |
|---|--|---------------|---------------------|-----------------------------|
| Tujuan 1 : Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Tinggi Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan. | Indikator 1 : Meningkatkan Pelaksanaan MTQ yang sukses, dawah Islamiaya terarah, Pembinaan Keagamaan, Pengelolah Zakat, dan hari-hari besar islam. | Presentase | 45 % | 100 % |
| | Indikator 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Imam, Petugas Syara, Guru TPA, Muballiq, Tasbeh dan Kipra. | Presentase | 45 % | 100 % |
| | Indikator 3 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Lomba Sekolah Sehat. | Presentase | 45 % | 100 % |
| Tujuan 2 : Mewujudkan Percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum dan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment. | Indikator 1 : Terbinanya Penataan Adm. Kependudukan | Presentase | 0 % | 100 % |
| | Pembinaan Upaya Pencegahan Narkoba | Presentase | 0 % | 100 % |
| | Indikator 2 : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. | Presentase | 0 % | 100 % |
| | Indikator 3 : Kelancaran Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. | Presentase | 45 % | 100 % |

4. SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Sasaran :

1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Terlaksananya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
5. Terlaksananya Penyediaan Jasa Keuangan
6. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
7. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
8. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan 2 : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sasaran :

1. Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Terpenuhi Belanja Alat Tulis Kantor
3. Tercapainya Belanja Penggandaan.

Tujuan 3 : Peningkatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Sasaran :

1. Terlaksananya Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
2. Terpenuhi Belanja Alat Tulis Kantor
3. Terpenuhi Belanja Transportasi
4. Terpenuhi Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga
5. Terlaksananya Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli

Tujuan 4 : Meningkatkan Program Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sasaran :

1. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2. Terpenuhi Belanja Alat Tulis Kantor
3. Terpenuhi Belanja Transportasi
4. Terpenuhi Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga
5. Terlaksananya Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli

Tujuan 5: Peningkatan Program Pendidikan Luar Biasa

Sasaran :

1. Terlaksananya Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan
2. Terlaksananya Pembinaan MTQ/STQ
3. Terlaksananya Pembinaan Tim Da'wah Islamiyah
4. Terlaksananya Pembinaan Keagamaan bagi Imam Masjid dan Petugas Syara
5. Terlaksananya Pencerahan Keagamaan
6. Terlaksananya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji
- 7.

Tujuan 6 : Peningkatan Penataan Administrasi Kependudukan dan Capil

Sasaran :

1. Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan
2. Terpenuhi Honorarium Pelaksana Kegiatan
3. Terpenuhi Belanja ATK
4. Terpenuhi Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga
5. Terpenuhi Belanja Jasa Narasumber

Tujuan 7 : Peningkatan Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan narkoba

Sasaran :

1. Terlaksananya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba
2. Terpenuhi Belanja Alat Tulis Kantor
3. Terpenuhi Belanja Transportasi
4. Terpenuhi Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga
5. Terlaksananya Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli

Tujuan 8 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran :

1. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
2. Terpenuhi Belanja Penggantian suku cadang
3. Terpenuhi Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Tabel 2. 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Bagian Kesra

| SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET AKHIR RENSTRA |
|--|--|---------------|---------------------|-----------------------------|
| Sasaran 1 : Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Tinggi Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan. | Indikator 1 : Meningkatkan Pelaksanaan MTQ yang sukses, dawah Islamiaya terarah, Pembinaan Keagamaan, Pengelolah Zakat, dan hari-hari besar islam. | Presentase | 45 % | 100 % |
| | Indikator 2 : Meningkatkan Kesejah Imam, Petugas Syara, Guru TPA, Muballiqli, Tasbeh dan Kipra. | Presentase | 45 % | 100 % |
| | Indikator 3 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Lomba Sekolah Sehat. | Presentase | 45 % | 100 % |
| Sasaran 2 : Mewujudkan Percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum dan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment. | Indikator 1 : Terbinanya Penataan Adm.Kependudukan | Presentase | 0 % | 100 % |
| | Pembinaan Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba | Presentase | 0 % | 100 % |
| | Indikator 2 : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. | Presentase | 45 % | 100 % |
| | Indikator 3 : Kelancaran Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. | Presentase | 45 % | 100 % |

5. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahunan

| SASARAN | PROGRAM PENDUKUNG |
|---|--|
| <i>Sasaran : 1</i> Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan. | 1. Program Pendidikan Luar Biasa |
| | 2. Program Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial |
| | 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat |
| <i>Sasaran : 2</i> Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang baik, penegakan hukum dan peng. kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment | 1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran |
| | 2. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba |
| | 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan & Capil |
| | 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. |

6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK tahun 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah telah menetapkan PK sbb :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2018.

| SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TA. 2018 |
|---|---|--------|-----------------|
| <i>Sasaran 1 :</i> Terciptanya Sistem Pelayanan dan Manajemen Perkantoran yang Akuntabel | <i>Indikator :</i> 1. Tersedianya Penyediaan jasa Surat Menyurat | Lbr | 451 lbr |
| | 2. Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | 9 unit |
| | 3. Tersedianya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Unit | 1 unit |
| | 4. Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas | Unit | 4 unit |
| | 5. Tersedianya Penyediaan Jasa Adm. Keuangan | Bln | 12 bln |
| | 6. Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Kali | 50 kali |
| | 7. Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Kali | 160 kali |
| | 8. Terlaksananya Pelayanan Adm. Perkantoran | Bln | 12 bln |

| | | | |
|---|---|-------|---------|
| Sasaran 2 : Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Indikator : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Unit | 4 unit |
| Sasaran 3 : Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. | Indikator : Tersedianya Sistem Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kali | 4 kali |
| Sasaran 4 : Terlaksananya Program Penataan Adm.Kependudukan | Indikator : Terlaksananya Penataan Adm.Kependudukan | Kegt | 1 kegt |
| Sasaran 5 : Terlaksananya Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat | .kegt | 5 kegt |
| Sasaran 6 : Terlaksananya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba | Terbinanya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba | Keg | 1 keg |
| Sasaran 7 : Terlaksananya Program Pendidikan Luar Biasa | Tersedianya kebutuhan pembinaan Forum masyarakat peduli pendidikan. | Kegt | 25 kegt |
| Sasaran 8: Terlaksananya Program Pemberdy. Kelembagaan Sosial | Tersedianya Fasilitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. | Bln | 12 bln |

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah telah menetapkan IKU Sebagai berikut :

Tabel 2.5. IKU SKPD Bagian Kesra

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|---|---|--------|--|-----------------|
| Sasaran 1 : Terciptanya Sistem Pelayanan dan Manajemen Perkantoran yang Akuntabel | Indikator : 1. Tersedianya Penyediaan jasa Surat Menyurat | Lbr | Jumlah Materai yang digunakan dibagi dengan Jumlah Materai yang ditargetkan dikali 100 % | Renja Bag.Kesra |
| | 2. Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | unit | Jumlah Unit yang tersedia dibagi dengan jumlah unit yang di targetkan dikali 100 % | Renja Bag.Kesra |
| | 3. Tersedianya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | unit | Jumlah Unit yang tersedia dibagi dengan jumlah unit yang di targetkan dikali 100 % | Renja Bag.Kesra |
| | 4. Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas | Unit | Jumlah Unit yang tersedia dibagi dengan jumlah unit yang di targetkan dikali 100 % | Renja Bag.Kesra |
| | 5. Tersedianya Penyediaan Jasa Adm.Keuangan | Bln | Jumlah bulan yang digunakan dibagi dengan jumlah bulan yang di targetkan kali 100 % | Renja Bag.Kesra |
| | 6. Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Kali | Jumlah giat yang tersedia dibagi dengan jumlah giat yang di targetkan kali 100 % | Renja Bag.Kesra |
| | 7. Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Kali | Jumlah giat yang tersedia dibagi dengan jumlah giat yang di targetkan kali 100 % | Renja Bag.Kesra |
| | 8. Terlaksananya Pelayanan Adm. Perkantoran | Bln | Jumlah bln yang digunakan dibagi dengan jumlah bln yang di targetkan kali 100 % | Renja Bag.Kesra |
| Sasaran 2 : Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Unit | Jumlah unit yang digunakan dibagi dengan jumlah bln yang di targetkan kali 100 % | Renja Bag.Kesra |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|------|---|-----------------|
| Sasaran 3 : Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. | Tersedianya Sistem Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kali | Jumlah Realisasi dibagi dengan target yang direncanakan di kali 100 % | Renja Bag.Kesra |
| Sasaran 4 : Terlaksananya Program Penataan Adm.Kependudukan | Terlaksananya Penataan Adm.Kependudukan | Kali | Jumlah Realisasi dibagi dengan target yang direncanakan di kali 100 % | Renja Bag.Kesra |
| Sasaran 5 : Terlaksananya Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat | Kegt | Jumlah giat yang tersedia dibagi dengan jumlah giat yang di targetkan kali 100 % | Renja Bag.Kesra |
| Sasaran 6 : Terlaksananya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | Terbinanya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | Kegt | Jumlah giat yang tersedia dibagi dengan jumlah giat yang di targetkan kali 100 % | Renja Bag.Kesra |
| Sasaran 7 : Terlaksananya Program Pendidikan Luar Biasa | Tersedianya kebutuhan pembinaan Forum masyarakat peduli pendidikan. | Kegt | Jumlah giat yang tersedia dibagi dengan jumlah giat yang di targetkan kali 100 % | Renja Bag.Kesra |
| Sasaran 8 : Terlaksananya Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial | Tersedianya Fasilitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. | Bln | Jumlah bln yang digunakan dibagi dengan jumlah bulan yang di targetkan kali 100 % | Renja Bag.Kesra |

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 16.825.648.000,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6. Rencana Belanja SKPD Bagian Kesra Tahun 2018

| NO | URAIAN | RENCANA (Rp) | % |
|----|------------------------|-------------------------|------------|
| 1. | Belanja Tidak Langsung | 0 | 0 |
| 2. | Belanja Langsung | 16.825.648.000,- | 100 |
| | Jumlah | 16.825.648.000,- | 100 |

Alokasi anggaran belanja Langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

| SASARAN | INDIKATOR | ANGGARAN (Rp) | PERSENTASE ANGG. (%) |
|--|---|-------------------------|----------------------|
| Sasaran 1 Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indikator : 1.Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.586.000,- | 0,02 |
| | 2. Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor | 4.600.000,- | 0,03 |
| | 3.Tersedianya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 5.000.000,- | 0,03 |
| | 4.Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional | 4.550.000,- | 0,03 |
| | 5.Tersedianya Penyediaan Jasa Adm. Keuangan | 77.648.200,- | 0,47 |
| | 6.Terpenuhnya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100.001.000,- | 0,60 |
| | 7. Terpenuhnya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 4.394.250,- | 0,03 |
| | 8. Tersedianya Pelayanan Adm. Perkantoran | 160.065.900,- | 0,96 |
| Sasaran 2 Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Indikator : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | 36.000.000,- | 0,22 |
| Sasaran 3 Terlaksananya Program Pening Pengeb. Sistem Pelp. Capaian Kinerja dan Keuangan | Indikator : Terpenuhnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 12.201.200,- | 0,08 |
| Sasaran 4 Terwujudnya Program Penataan Adm.Kepend. | Indikator : Terpenuhnya Penataan Adm.Kependudukan | 51.147.500,- | 0,31 |
| Sasaran 5 Terwujudnya Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Indikator : Tersedianya Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat | 353.225.050,- | 2,10 |
| Sasaran 6 Terlaksananya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | Indikator : Terbinanya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | 42.005.000,- | 0,25 |
| Sasaran 7 Terlaksananya Program Pendidikan Luar Biasa | Indikator : Tersedianya Kebutuhan Pendidikan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan | 6.940.853.400,- | 41,26 |
| Sasaran 8 Terlaksananya Program Pemb.Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Indikator : Tersedianya Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial | 10.560.095.500,- | 62,77 |
| TOTAL | | 16.825.648.000,- | 100 % |

Pada Tabel 2.7 diatas menunjukkan bahwa jumlah anggaran untuk program/kegiatan tahun anggaran 2018 sebesar **Rp16.825.648.000,-** dengan peresentase anggaran yang terbesar untuk mendukung pencapaian sasaran adalah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan besaran 62,77%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Terlaksananya Program Pendidikan Luar Biasa yaitu sebesar 41,26%. , sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 0,08 % dari total anggaran belanja langsung.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Pencapaian kinerja IKU Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|--------|--------|-----------|-------------|
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Lbr | 451 | 451 | 100 |
| 2. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | unit | 4 | 4 | 100 |
| 3. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasl | unit | 4 | 4 | 100 |
| 4. | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | unit | 1 | 1 | 100 |
| 5. | Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan | Bln | 12 | 12 | 100 |
| 6. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | kali | 50 | 50 | 100 |
| 7. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | kali | 160 | 0 | 0 |
| 8. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Bln | 12 | 12 | 100 |

Tabel. 3.1.

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|--------|--------|-----------|-------------|
| 9. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | Unit | 4 | 4 | 100 |
| 10. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Kali | 4 | 4 | 100 |
| 11. | Fasilitasi Sosialisasi Kebijakan Kependudukan. | Giat | 1 | 1 | 100 |
| 12. | Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat | Giat | 5 | 3 | 100 |
| 13. | Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah. | Giat | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba | Giat | 1 | 1 | 100 |
| 14. | Pembinaan MTQ/STQ | Giat | 1 | 1 | 100 |
| 15. | Pencerahan Keagamaan/Muballiq | Kali | 1 | 1 | 100 |
| 16. | Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji | Kali | 1 | 1 | 100 |
| 17. | Tunjangan Imam, Petugas Syara, Guru TPA dan Muballiq | Bln | 12 | 5 | 45 |
| 18. | Pembinaan KIPRA | giati | 1 | 1 | 100 |
| 19. | Pembinaan Tasbeh | giat | 29 | 0 | 0 |
| 20. | Pembinaan BKMT | giat | 7 | 7 | 100 |
| 21. | Pemberdayaan FKCA | giat | 1 | 1 | 100 |
| 22. | Pembinaan BKPRMI | giat | 1 | 1 | 100 |
| 23. | Pembinaan ISA/IKM | giat | 1 | 1 | 100 |
| 24. | Pembinaan MUI | giat | 1 | 1 | 100 |
| 25. | Pembinaan BAZNAS Kabupaten | giat | 1 | 1 | 100 |
| 26. | Pembinaan PD. Muhammadiyah | giat | 1 | 1 | 100 |
| 27. | Pembinaan DMI | giat | 1 | 1 | 100 |
| 28. | Pembinaan Majelis Jemaat Kristen | giat | 5 | 5 | 100 |

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 sebanyak 28 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja

| NO. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | KODE |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1. | 91 < | Sangat Tinggi | ST |
| 2. | 76 < 90 | Tinggi | T |
| 3. | 66 < 75 | Sedang | S |
| 4. | 51 < 65 | Rendah | R |
| 5. | < 50 | Sangat Rendah | SR |

Dari Tabel IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 91 < persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan 76 < 90 persen telah memenuhi kriteria memuaskan 66 < 75 persen telah memenuhi kriteria cukup memuaskan, 51 < 65 persen telah memenuhi kriteria kurang memuaskan, dan < 50 persen dengan kriteria tidak memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

2. Capaian Kinerja Organisasi.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian tentu masih ada sasaran strategis yang belum mencapai target karena dari berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.3.

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--------------------------|---|--------|--------|-----------|---------------|
| <i>Sasaran :1</i> | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Lbr | 451 | 451 | 100 |
| | 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | 4 | 4 | 100 |
| | 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasl | Unit | 4 | 4 | 100 |
| | 4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Unit | 1 | 1 | 100 |
| | 5. Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan | Bln | 12 | 12 | 100 |
| | 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Kali | 50 | 50 | 100 |
| | 7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Kali | 160 | 0 | 0 |
| | 8. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Bln | 12 | 12 | 100 |
| Rata-rata capaian | | | | | 0,88 % |

Dari 8 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 7 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 1 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Peningkatan Kualitas Pelayanan Adm. Perkantoran** ini telah mencapai target dengan capaian **0,88 %**(persen).

Tabel. 3.3.

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Tar get | Realis | Capaian (%) |
|--|--|--------|---------|--------|-------------|
| Sasaran 2 : Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terpenuhinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Unit | 4 | 4 | 100 |
| Rata rata Capaian | | | | | 100 |
| Sasaran 3 : Terwujudnya Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Tersedianya Kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah | Kgiat | 5 | 3 | 0,60 |
| Rata rata Capaian | | | | | 0,60 |
| Sasaran 4 : Terwujudnya Program Fasilitasi Sosialisasi Kebijakan Kependudukan & Capil | Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Kebijakan Kependudukan & Capil | Kgiat | 1 | 1 | 100 |
| Rata rata Capaian | | | | | 100 |
| Sasaran 5: Terwujudnya Program Penyuluhan Kearsipan dilingkungan instansi pemerintah | Tersedianya Program Penyuluhan Kearsipan dilingkungan instansi pemerintah | Kgiat | 1 | 0 | 0 |
| Rata rata Capaian | | | | | 0 |
| Sasaran 6 : Terwujudnya Program Penyuluhan Kearsipan dilingkungan instansi pemerintah | Tersedianya Program Penyuluhan Kearsipan dilingkungan instansi pemerintah | Kgiat | 1 | 0 | 0 |
| Rata rata Capaian | | | | | 0 |
| Sasaran 7: Terwujudnya Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan | 1. Pembinaan MTQ/STQ | Kegt | 1 | 1 | 100 |
| | 2. Pembinaan Tim Da'wah Islamiyah | Kegt | 1 | 1 | 100 |
| | 3. Pembinaan Keagamaan bagi Imam Masjid/ Petugas Syara | Kegt | 1 | 1 | 100 |
| | 4. Pencerahan Keagamaan Pemberangkatan dan | Kegt | 1 | 1 | 100 |
| | 5. pemulangan Jama'ah Haji | Kegt | 1 | 1 | 100 |
| Rata rata Capaian | | | | | 100 |

| Sasaran 8 : | | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|------|----|----|--------------|
| Terwujudnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos. | 1. | Tunjangan Imam dan Petugas Syara | Bln | 12 | 12 | 100 |
| | 2. | Tunjangan Guru TPA | Bln | 12 | 12 | 100 |
| | 3. | Tunjangan Muballig | Bln | 12 | 12 | 100 |
| | 4. | Pembinaan DMI | Kegt | 1 | 1 | 100 |
| | 5. | Penguatan Org Kelemb. KIPRA | Kegt | 1 | 1 | 100 |
| | 6. | Pembinaan Tasbeh | Kali | 29 | 29 | 100 |
| | 7. | Pembinaan BKMT | Kali | 3 | 3 | 100 |
| | 8. | Pemberdayaan FKCA | Kegt | 1 | 1 | 100 |
| | 9. | Pembinaan BKPRMI | Kali | 3 | 3 | 100 |
| | 10. | Pembinaan Isa/IKM | Kegt | 1 | 1 | 100 |
| | 11. | Pembinaan MUI | Kegt | 1 | 1 | 100 |
| | 12. | Pembinaan Baznas Kabupaten | Kegt | 1 | 1 | 100 |
| | 13. | Pembinaan Muhammadiyah | Kegt | - | - | 0 |
| Rata-rata capaian | | | | | | 88,00 |

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.4.

| Indikator Kinerja | | Capaian (%) | | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 | 70 | 80 | 50 | |
| 2. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 70 | 70 | 100 | 88 | 100 |
| 3. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasl | 100 | 100 | 100 | 100 | 19,98 |
| 4. | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,45 |
| 6. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 100 | 85 | 90 | 100 | 72,39 |
| 7. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 100 | 85 | 90 | 0 | 0 |
| 8. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 99 | 100 | 100 | 67,81 |
| Rata-rata capaian | | 96,25 | 88,63 | 95,00 | 79,75 | 59,88 |

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran** ini mengalami penurunan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, sedangkan dari tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu dari 88,63 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 95,00 persen pada tahun 2016, dan pada tahun 2018 hanya mencapai 59,88 persen.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel. 3.5.

| | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi kinerja target jangka menengah | Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini | Capaian (%) |
|----|--|--------|--|---|-------------|
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Lbr | 1,250 | 875 | 70,00 |
| 2. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | 45 | 35 | 77,70 |
| 3. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasi | Unit | 20 | 16 | 80,00 |
| 4. | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Unit | 5 | 5 | 100,00 |
| 5. | Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan | Bln | 60 | 60 | 100,00 |
| 6. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Kali | 240 | 176 | 73,33 |
| 7. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Kali | 160 | 0 | 0 |
| 8. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Bln | 60 | 60 | 100,00 |

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka terdapat 7 indikator yang mencapai rata-rata target jangka menengah, namun ada 1 indikator yang belum mencapai target jangka menengah.

- d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/ pencapaian beberapa indikator pada sasaran **peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran** ini didukung dengan adanya program pelayanan administrasi perkantoran, serta terpenuhinya alokasi anggaran yang tersedia dalam DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sedangkan indikator yang belum mencapai target bukan disebabkan karena tidak tersedianya anggaran, namun karena terbatasnya kemampuan sumber daya manusia atau aparat untuk pemenuhan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran *peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran* ini adalah sebesar Rp. 398.150.350,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 293.346.050,- atau 73,68 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 59,88 persen

- f. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran pada SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah 8 (delapan) program dan 27 kegiatan, yaitu: program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan 8 kegiatan, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan 1 kegiatan, program upaya kesehatan masyarakat dengan 5 kegiatan, program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan 1 kegiatan, program pendidikan luar biasa dengan 5 kegiatan dan program pemberdayaan kelembagaan social dengan 26 kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka analisis capaian sasaran strategis SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2018 dengan penyediaan anggaran sebesar **Rp. 16.825.648.000.-**, dengan realisasi **Rp. 10.075.041.750.-** maka realisasi pencapaian sasaran secara kumulatif telah mencapai **59,88%** (Lima Puluh Sembilan koma delapan puluh delapan Persen) dari target yang telah ditetapkan berdasarkan sasaran dan tujuan dalam *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Kab.Sidenreng Rappang*. Dari realisasi tersebut diatas pencapaian sasaran untuk tahun anggaran 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Adapun **kendala dan hambatan** yang dihadapi, sehingga ada beberapa target kegiatan yang belum mencapai 100 % dari sasaran yang telah ditetapkan disebabkan karena :

1. *Terbatasnya kemampuan dana, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana..*
2. *Terbatasnya kemampuan daerah dari segi finansial dan personil yang profesional;*
3. *Kebutuhan masyarakat setiap tahunnya semakin meningkat terutama yang terkait dengan kegiatan kesejahteraan masyarakat.*
4. *Lemahnya Pemahaman Administrasi Penerimaan Insentif para Imam Masjid dan Petugas Syara.*

Dan berikut strategi **pemecahan masalah** yang akan dilaksanakan ditahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. *Meningkatkan keberdayaan masyarakat, agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan beragama yang berkepribadian sebagai pedoman dalam tatanan kehidupan yang beriman, bertaqwa, terampil, berbudaya dan mandiri.*
2. *Meningkatkan kualitas pelayanan kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap masalah, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia.*
3. *Meningkatkan sistem mekanisme penyaluran Insentif Imam Masjid dan Petugas syara.*
4. *Memantapkan perumusan rencana, program dan kegiatan yang lebih berkualitas sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta melaksanakannya secara partisipatif dengan penuh tanggung jawab.*

g. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel berikut ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 8 Program, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 9 Indikator, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Pelayanan Administrasi Perkantoran, telah mencapai kinerja sebanyak 100% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 73,68 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran terlaksananya pengembangan penyusunan laporan capaian kinerja dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 59,88 %.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018.

| No. | SASARAN / INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN (Rp) | | |
|-----|--|---------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | TARGET | REALISASI | PERS EN TASE (%) | TARGET | REALISASI | PERS EN TASE (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 451 lbr | 451 lbr | 100 | 2.586.000,- | 2.586.000,- | 100 |
| 2. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9 unit | 8 unit | 89 | 4.600.000,- | 590.000,- | 12,83 |
| 3. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasi | 4 unit | 3 unit | 75 | 4.550.000,- | 909.000,- | 19,98 |
| 4. | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 1 Unit | 1 unit | 100 | 5.000.000,- | 4.984.650,- | 99,69 |
| 5. | Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan | 12 bln | 12 bln | 100 | 77.648.200,- | 74.892.000,- | 96,45 |
| 6. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 50 kali | 50 Kali | 100 | 139.306.000,- | 100.843.500,- | 72,39 |
| 7. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 12 Kali | 0 kali | 0 | 4.394.250,- | 0 | 0 |
| 8. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bln | 12 Bln | 100 | 160.065.900,- | 108.540.900,- | 67,81 |
| 9. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4 unit | 3 unit | 75 | 36.000.000,- | 17.135.500,- | 47,60 |
| 10. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 4 Kali | 4 kali | 100 | 12.201.200,- | 10.926.200,- | 89,55 |
| 11. | Penataan Administrasi Kependudukan & Capil | 1 kgiat | 1 kgiat | 100 | 51.147.500,- | 46.997.500,- | 91,98 |
| 12. | Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat | 5 kgiat | 3 kgiat | 60 | 268.525.050,- | 146.300.050,- | 54,48 |
| 13. | Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | 1 kgiat | 1 kgiat | 100 | 42.005.000,- | 38.765.000,- | 92,29 |
| 14. | Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan | 5 kgiat | 5 kgiat | 100 | 5.636.548.400,- | 4.960.834.950,- | 88,01 |
| 15. | Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 12 bln | 12 bln | 100 | 10.381.070.500,- | 4.560.736.500,- | 43,93 |

Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | PERSENT ASE CAPAIAN KINERJA (>100%) | PERSEN TASE PENYERAPAN ANGGARAN (%) | TINGKAT EFESIENSI |
|-----|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terciptanya Sistem Pelayanan dan Manajemen Perkantoran yang Akuntabel | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 | 0,02 | 99,08 |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 | 0,03 | 99,07 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasl | 100 | 0,03 | 99,07 |
| | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 100 | 0,03 | 99,07 |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan | 100 | 0,47 | 99,53 |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 100 | 0,60 | 99,40 |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 100 | 0,03 | 99,07 |
| | | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 0,96 | 99,04 |
| 2. | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 0,22 | 99,88 |
| 3 | Terlaksananya Program Peningk Pengemb Sistem Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Keuangan | Terpenuhinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100 | 0,08 | 99,02 |
| 4. | Terlaksananya Program Penataan Administrasi Kependudukan & Capil | Terpenuhinya Penataan Administrasi Kependudukan dan Capil | 100 | 0,31 | 99,69 |
| 5 | Terwujudnya Program Upaya Kesehatan Masy. | Tersedianya Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah | 100 | 2,10 | 98,90 |
| 6 | Terwujudnya Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | Tersedianya Kegiatan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | 100 | 0,25 | 99,75 |
| 7 | Terwujudnya Program Pendidikan Luar Biasa | Tersedianya Program Pendidikan Luar Biasa | 100 | 41,26 | 58,74 |
| 8 | Terwujudnya Program Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 100 | 62,77 | 37,23 |

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp. 16.825.648.000,- yang dialokasikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (62,77 %). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan (0,08%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari pada realisasi capaian kinerjanya.

Berikut ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja. Untuk lebih jelasnya dapat kami kemukakan pada tabel berikut ini :

Daftar : Realisasi Anggaran Belanja Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2018 :

| No. Urut | Uraian Belanja | Jumlah Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran | Per sentase (%) |
|----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1. | Program Pelayanan Adm.Per kantor | 398.150.350 | 293.346.05 | 104.804.300 | 73,68 |
| | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.586.000 | 2.586.000 | 0 | 100 |
| | ➤ Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 2.586.000 | 2.586.000 | 0 | 100 |
| | - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 4.600.000 | 590.000 | 4.010.000 | 12,82 |
| | ➤ Belanja Upah/ Jasa Pihak Ketiga | 4.600.000 | 590.000 | 4.010.000 | 12,82 |
| | - Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 5.000.000 | 4.984.650 | 15.350 | 99,69 |
| | ➤ Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 5.000.000 | 4.984.650 | 15.350 | 99,69 |
| | - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 4.550.000 | 909.000 | 3.641.000 | 19,97 |
| | ➤ Belanja surat Tanda Nomor Kendaraan | 4.550.000 | 909.000 | 3.641.000 | 19,97 |
| | - Penyediaan jasa administrasi keuangan | 77.648.200 | 74.892.000 | 2.756.200 | 96,45 |
| | ➤ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 77.532.000 | 74.892.000 | 2.640.000 | 96,59 |
| | ➤ Belanja Alat Tulis Kantor | 116.200 | 0 | 116.200 | 0 |
| | - Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 139.306.000 | 100.843.500 | 38.462.500 | 72,38 |
| | ➤ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 139.306.000 | 100.843.500 | 38.462.500 | 72,38 |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | - Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 4.394.250 | 0 | 4.394.250 | 0 |
| | ➤ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 4.394.250 | 0 | 4.394.250 | 0 |
| | - Pelayanan administrasi perkantoran | 160.065.900 | 108.540.900 | 51.525.000 | 67,81 |
| | a. Belanja Alat Tulis Kantor | 10.998.400 | 10.998.400 | 0 | 100 |
| | b. Belanja Upah/ Jasa Pihak ketiga | 42.000.000 | 30.000.000 | 12.000.000 | 71,42 |
| | c. Belanja Cetak | 2.200.000 | 400.000 | 1.800.000 | 18,18 |
| | d. Belanja Penggandaan | 6.805.000 | 6.805.000 | 0 | 100 |
| | e. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 73.920.000 | 57.000.000 | 16.920.000 | 77,11 |
| | f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24.142.500 | 3.337.500 | 20.805.000 | 13,82 |
| 2. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 12.201.200 | 10.926.200 | 1.275.000 | 89,55 |
| | - Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD | 12.201.200 | 10.926.200 | 1.275.000 | 89,55 |
| | a) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.900.000 | 9.150.000 | 750.000 | 92,42 |
| | b) Belanja Alat Tulis Kantor | 801.200 | 801.200 | 0 | 100 |
| | c) Belanja Penggandaan | 1.500.000 | 975.000 | 525.000 | 65,00 |
| 3. | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 268.525.050 | 146.300.050 | 122.225.000 | 54,48 |
| | - Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat | 268.525.050 | 146.300.050 | 122.225.000 | 54,48 |
| | a) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 24.400.000 | 21.650.000 | 2.750.000 | 88,72 |
| | b) Belanja Alat Tulis Kantor | 268.000 | 268.000 | 0 | 100 |
| | c) Belanja Upah/ Jasa Pihak Ketiga | 43.550.050 | 42.550.050 | 1.000.000 | 97,70 |
| | d) Belanja Jasa Transportasi | 137.750.000 | 34.800.000 | 102.950.000 | 25,26 |
| | e) Belanja Cetak | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 100 |
| | f) Belanja Penggandaan | 732.000 | 732.000 | 0 | 100 |
| | g) Belanja Sewa Meja Kursi | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | h) Belanja Sewa Tenda | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | i) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 15.525.000 | 0 | 15.525.000 | 0 |
| | j) Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 17.700.000 | 17.700.000 | 0 | 100 |
| | k) Belanja Jasa Narasumber/ Instruktur/ Tenaga Ahli | 26.400.000 | 26.400.000 | 0 | 100 |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4. | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 10.381.070.500 | 4.560.736.500 | 5.820.334.000 | 43,93 |
| | - Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. | 10.381.070.500 | 4.560.736.500 | 5.820.334.000 | 43,93 |
| | a) Belanja Alat Tulis Kantor | 12.521.000 | 11.792.000 | 729.000 | 94,17 |
| | b) Belanja Upah/ Jasa Pihak Ketiga | 9.887.746.500 | 4.148.086.500 | 5.739.660.000 | 41,95 |
| | c) Belanja Jasa Transportasi | 85.850.000 | 64.250.000 | 21.600.000 | 74,83 |
| | d) Belanja Cetak | 8.275.000 | 8.275.000 | 0 | 100 |
| | e) Belanja Penggandaan | 2.483.000 | 1.608.000 | 875.000 | 64,76 |
| | f) Belanja Penjilidan | 45.000 | 45.000 | 0 | 100 |
| | g) Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 100 |
| | h) Belanja Sewa Meja Kursi | 7.250.000 | 7.250.000 | 0 | 100 |
| | i) Belanja sewa Generator | 270.000 | 270.000 | 0 | 100 |
| | j) Belanja sewa tenda | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 100 |
| | k) Belanja Sewa Sound System | 3.150.000 | 3.150.000 | 0 | 100 |
| | l) Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 59.585.000 | 59.585.000 | 0 | 100 |
| | m) Belanja barang yang akan diserahkan kpd masyarakat | 229.325.000 | 219.325.000 | 10.000.000 | 95,63 |
| | n) Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/ Tenaga Ahli | 75.270.000 | 27.800.000 | 47.470.000 | 36,93 |
| 5. | Program Pendidikan Luar Biasa | 5.636.548.400 | 4.960.834.950 | 675.713.450 | 88,01 |
| | - Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan | 5.636.548.400 | 4.960.834.950 | 675.713.450 | 88,01 |
| | a) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 204.960.000 | 151.110.000 | 53.850.000 | 73,72 |
| | b) Belanja Alat Tulis Kantor | 7.844.000 | 4.542.000 | 3.302.000 | 57,90 |
| | c) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, Battery kering) | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 |
| | d) Belanja Upah/ Jasa Pihak Ketiga | 5.041.410.000 | 4.552.092.000 | 489.318.000 | 90,29 |
| | e) Belanja Jasa Transportasi | 55.972.650 | 48.986.700 | 6.985.950 | 87,51 |
| | f) Belanja Cetak | 7.125.000 | 4.625.000 | 2.500.000 | 64,91 |
| | g) Belanja Penggandaan | 354.250 | 354.250 | 0 | 100 |
| | h) Belanja Sewa Meja Kursi | 11.250.000 | 0 | 11.250.000 | 0 |
| | i) Belanja Sewa Tenda | 18.200.000 | 0 | 18.200.000 | 0 |
| | j) Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 233.132.500 | 172.725.000 | 60.407.500 | 74,08 |
| | k) Belanja Jasa Narasumber/ Instruktur/ Tenaga Ahli | 52.800.000 | 26.400.000 | 26.400.000 | 50 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 6. | Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | 42.005.000 | 38.765.000 | 3.240.000 | 92,29 |
| | - Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda | 42.005.000 | 38.765.000 | 3.240.000 | 92,29 |
| | a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11.350.000 | 8.700.000 | 2.650.000 | 76,65 |
| | b. Belanja Alat Tulis Kantor | 1.885.000 | 1.885.000 | 0 | 100 |
| | c. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga | 4.000.000 | 3.500.000 | 500.000 | 87,5 |
| | d. Belanja jasa Transportasi | 11.400.000 | 11.400.000 | 0 | 100 |
| | e. Belanja Cetak | 300.000 | 300.000 | 0 | 100 |
| | f. Belanja Penggandaan | 400.000 | 400.000 | 0 | 100 |
| | g. Belanja Makanan & Minuman Tamu | 7.470.000 | 7.380.000 | 90.000 | 98,79 |
| | h. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli | 5.200.000 | 5.200.000 | 0 | 100 |
| 7. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 36.000.000 | 17.135.500 | 18.864.500 | 47,60 |
| | - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 36.000.000 | 17.135.500 | 18.864.500 | 47,60 |
| | a. Belanja Penggantian Suku cadang | 15.000.000 | 4.150.000 | 10.850.000 | 27,66 |
| | b. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas | 21.000.000 | 12.985.500 | 8.014.500 | 61,83 |
| TOTAL | | 16.825.648.000 | 10.075.041.750 | 6.750.606.250 | 59,88 % |

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj-IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj-IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj-IP Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 adalah sangat baik, karena terdapat beberapa indikator yang memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah, upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) yang mencakup penentuan program / kegiatan dan alokasi anggaran. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Namun dengan demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan dan seterusnya. Bagi instansi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj-IP hasil evaluasi capaian kinerja di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi makna jika hanya tidak berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkrit untuk penerapan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj-IP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Pangkajene Sidenreng, 22 Januari 2019.

KEPALA BAGIAN KESRA,

BACHTIAR, S.HI, M.SI

Pangkat : Pembina

NIP. 19710122 199203 1 003.

